



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU**

Nomor SOP	: 188 /SI / DPMPTSP /2023
Tanggal Pembuatan	: 21 Agustus 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Berlaku	:
Disahkan	Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu  SUPRAN, SH. MH Pembina Utama Madya/ IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	: IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 99PMK.0/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga Negara
2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/11/2007 Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permohonan dalam Koperasi dan UKM dalam rangka Program Perempuan Keluarga sehat dan Sejahtera (PERKASSA)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 24 Mei 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Provinsi Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan printer 2. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila proses pelayanan Perizinan Penelitian tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ini maka proses perizinan akan tertunda dan memperpanjang waktu pelayanan perizinan dan mengurangi tingkat kepuasan masyarakat</p> <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Koordinasi intern di DPMPTSP 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan